



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN  
HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**OLEH**

**RANIANSYAH**

**B111 13 082**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

# **HALAMAN JUDUL**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**OLEH:**

**RANIANSYAH**

**B111 13 082**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**RANIANSYAH**

**B111 13 082**

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 14 November 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua,**



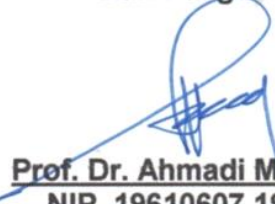
**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H**  
**NIP. 19570101 198601 1 011**

**Sekretaris,**



**Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H**  
**NIP. 19781017 200501 1 001**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,

Nama : Raniansyah

Nomor Induk Mahasiswa : B11113082

Departemen : Hukum Tata Negara

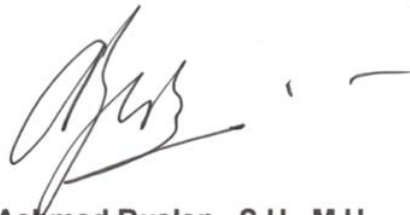
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT  
NEGARAWAN HAKIM KONSTITUSI DALAM  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Telah diperiksa dan disetujui, untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Achmad Ruslan., S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 011



Dr. Romi Librayanto., S.H., M.H.  
NIP. 19781017 200501 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : RANIANSYAH   |
| Nomor Pokok   | : B11113082  |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Bagian        | : Hukum Tata Negara  |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Almadi Miru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**RANIANSYAH, B 111 13 082, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Dibimbing oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana makna syarat negarawan hakim konstitusi dan bagaimana perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan menggunakan bahan hukum lainnya. Sumber hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, serta referensi-referensi (buku, kamus hukum, artikel ilmiah, dan laporan), yang selanjutnya diinventarisir kemudian diolah untuk diharmonisasi dan dikaji lebih lanjut dengan teori-teori hukum sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kata negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 belum mencerminkan perwujudan fungsi bahasa hukum (fungsi komunikasi dan ragam teknik), Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU MK juga belum mencerminkan asas kejelasan rumusan dan asas dapatnya dilaksanakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai perintah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih menimbulkan kebingungan bagi pelaksana undang-undang dan masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Ditinjau dari komposisi bahasa hukum dan konstitusi, memperhatikan makna negarawan yang mencakup pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam, kepribadian yang tidak tercela, serta komitmen mulia untuk bangsa dan negara, maka komposisi bahasa konstitusi pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 dan komposisi bahasa hukum pada Pasal 15 UU MK, yang menempatkan syarat negarawan berdampingan dengan syarat lain yang sejatinya merupakan cakupannya menjadi tidak tepat, karena bersifat berulang/berlebihan (*redundant*). Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan jabatan hakim yang memegang peranan dalam mengawal keadilan. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi memiliki dampak besar, karena akan selalu bersinggungan dengan sifat

putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat bagi segenap penyelenggara negara dan warga negara. Perwujudan syarat negarawan dapat diperoleh dengan menelusuri rekam jejak calon untuk mengetahui tingkat pengalaman; menelusuri jumlah buku dan/atau jumlah publikasi ilmiah, pengetahuan umum, dan bahan bacaan seorang calon hakim konstitusi untuk mengetahui tingkat pengetahuan; menelusuri pola hidup dan hubungannya dengan lingkungannya untuk mengetahui kepribadian; serta menanggalkan jabatan, pekerjaan, atau profesi lainnya, mengkhidmadkan dirinya memberi gagasan dan ide bagi permasalahan bangsa dan negara, yang keseluruhan berpuncak pada pengucapan sumpah atau Janji hakim konstitusi, sebagai wujud komitmennya terhadap bangsa dan negara. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi selama ini belum maksimal, mengingat belum ada ukuran baku dalam proses seleksi mengenai tingkat pengetahuan, pengalaman, kepribadian, dan komitmen seorang calon hakim konstitusi.

**Kata Kunci:** *Negarawan, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.*

## **ABSTRACT**

**RANIANSYAH, B 111 13 082, Juridical Review toward Requirements Statesman to Constitution Judge in Constitution of The Republic of Indonesia 1945 (Guided by Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H as Tutor I and Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H as Tutor II).**

This study aims to know how meaning requirements statesman to constitution judge and how embodiment requirements statesman to constitution judge in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945.

Type research used is juridical–normative research, namely research based on literature research using approach to a problem in question with reference to norms law that was found in laws and regulations in Indonesia , and use of other legal. Sources of law of material primary and secondary material law, consisting of laws and regulations related to and reference (books, dictionary law, scientific article, and report). Then on the process would then processed to harmonize and further review with law theories so that obtained formulation scientific to answer problems in this research.

The result of this research showed that, statesman as a requirements to constitution judge in Constitution of The Republic of Indonesia 1945 had not reflected embodiment function of legal language (communication function and variety of the technique), further provisions as stipulated in Article 15 Law of Constitutional Court (UU MK) is also had not reflected the bases for the formulation of clarity and carried out a inability of the provisions of the legislations, in accordance with the directive of Law No. 12 years 2011 On The Establishment of Legislation (UU 12/2011) , Because it is still a lot of confusion arose implementers laws and still pose an interpretation of the diverse. In terms of composition legal language and the constitution, regard to its meaning statesman which includes considerable experience, knowledge and deep, personality irreproachable, as well as the commitment noble to the nation, so the composition of the language of the constitution in Article 24C Verse ( 5 ) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and composition of legal language to Article 15 UU MK, who puts becomes one of the requirements statesman side by side with another requirement expressed who basically is the scope of it are inappropriate, because it is redundant .The embodiment of statesman as one of requirement of constitution judge in Constitution of The Republic of Indonesia is important, that it deals with officials could lose their positions the judge who has a role to play in protecting justice. Embodiment requirements statesman the constitution judge to have a big impact , because it will be always intersect with the nature of the decision of the constitutional court who final and binding on all organizers of the state and citizens. Embodiment requirements statesman can be obtained



by tracing track record of a candidate for know the level experience; track the number of books and / or scientific publication, general knowledge, of reading a candidate constitution judge in order to determine the level of knowledge; tracking patten life and its relation fits the surroundings perfectly to know personality; and put off the post, work, or other profession, himself give ideas with problems of nation and country, that a whole culminating in the pronounciation of a vow or promise the constitution judge, as a form of their commitment toward nation and country. Embodiment requirements statesman the constitution judge there has not yet been maximum, because as yet there are standart in the selection of about it.

**Keyword:** *Statesman, Constitution Judge, Constitutional Court*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Wujud cinta paling tulus adalah syukur, sabar, dan ikhlas, telah diberi kesempatan duduk di bangku kuliah, telah diberi kesabaran menjalani segala proses dan peristiwa, dan telah diberi keikhlasan atas segala perjuangan, hingga telah diberi kesempatan menulis dan merasakan nikmat sebagai makhluk Tuhan yang bisa berpikir, olehnya itu dapat menelurkan ide melalui karya tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Salam serta shalawat bagi Rasulullah SAW, tokoh inspiratif sepanjang zaman.

Setiap pemberian yang diberikan dengan ikhlas tidak akan sanggup dibayar oleh orang yang diberi, hanya terima kasih dan selalu terima kasih kepada dua orang tuaku, Anita dan Abd. Rahman yang telah menjadi hangat bagi segala pelukan, telah menjadi perpustakaan dari segala nasihat, telah menjadi kasih yang tidak akan renta, sekaligus produser utama dari segala semangat. Terima kasih kepada dua adikku, Andriansyah dan Nitra Anggun Rahmadani yang telah menjadi bagian dari alasan hidupku untuk terus berjuang sebagai seorang kakak. Terima kasih

kepada keluargaku, tante-tante, dan paman-paman luar biasa yang telah menjadi tangan-tangan yang telah mengawalku tumbuh hingga hari ini, orang-orang yang tidak lepas dari setiap perjalanan sedih dan bahagiaku. Terima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi 'mesin pencetak semangat', yang telah menjelma menjadi sebagian puisi yang juga kutulis berbarengan dengan skripsi ini.

Pencapaian atau penyelesaian naskah skripsi ini, bukan hanya pencapaian penulis, namun juga dosen-dosen andalan yang telah membimbing. Oleh karena itu, terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan bagi penulis, terima kasih juga kepada Dr. Romi Librayanto, S.H. M.H. selaku pembimbing II, yang telah membimbing hingga banyak pemahaman dan wawasan baru yang penulis dapatkan, juga merupakan pembina organisasi yang selalu mengajarkan pelajaran hidup, begitu banyak sendi kehidupan. Catatan yang paling penulis ingat bahwa, majulah tanpa memundurkan orang lain, tinggilah tanpa merendahkan orang lain, baiklah tanpa menjelekkkan orang lain, hiduplah tanpa mematikan orang lain.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Ibu **Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** sebagai Wakil Dekan I, dan Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM**, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** dan Bapak **Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku penguji.
5. Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**, selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara serta Bapak **Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku sekretaris Departemen Hukum Tata Negara
6. Seluruh **Staf Dosen Pengajar** pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu.
7. Seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Seluruh **Staf Ruang Baca** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur baik ketika penulis mendapatkan tugas maupun dalam penyusunan tugas akhir ini.

9. Buat saudara-saudara keren **Angkatan ASAS (Aktualisasi Mahasiswa yang Adil dan Solutif) 2013** yang telah menjadi teman, sahabat, serta saudara selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga **Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHaK Unhas)**, organisasi yang telah menjadi rumahku berproses selama di kampus, rumah yang punya banyak adik dan kakak keren.
11. Keluarga **LeDHaK Cangkul** (LeDHaK Angkatan 2013), dengan berbagai jenis orang 'gila' di dalamnya. Terima kasih telah menjadi dingin, hangat, asin, pahit, manis, dan segala rasanya persahabatan.
12. Para senior andalan, **Hasanuddin Ismail, S.H., , Afdalis, S.H., dan Wahyudi Kasrul, S.H.** Atas bimbingan, arahan, dan bantuannya dalam segala hal kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar **Forum Negarawan Muda Indonesia, dan Pengurus Daerah Sulawesi-Selatan**, salah satu inspirasi hingga memilih judul yang berkaitan dengan negarawan.
14. Keluarga Besar, **Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (UKM KPI) Universitas Hasanuddin.**
15. Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin**

16. Keluarga Besar **Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep (IPPMP) Universitas Hasanuddin.**
17. Keluarga **Alumni Kelas Politik Cerdas Berintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Yayasan Satunama.**
18. Keluarga **Alumni Kelas LIGHTS 2017, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat- Jakarta.**
19. Keluarga **Alumni Youth Conference on Anti-Corruption, Indonesia Anti-Corruption Forum V, Transparency International Indonesia dan Youth Proactive.**
20. Teman-teman **KKN Kebangsaan 2016 - Kepulauan Riau, khususnya Posko Desa Pelakak, Singkep Pesisir, Kab. Lingga,**  
KKN dengan warna almamater terbanyak.
21. Sahabat-sahabat terbaik dari berbagai Universitas yang  
dipertemukan dalam berbagai event.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sesungguhnya-sungguhnya, sedalam-sedalamnya. semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk saling berterima kasih di lain kesempatan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, September 2017

Raniansyah

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                      | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....          | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....             | iii  |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... | iv   |
| ABSTRAK .....                            | v    |
| ABSTRACT .....                           | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                     | ix   |
| DAFTAR ISI .....                         | xiv  |
| DAFTAR TABEL .....                       | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 7    |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 7    |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 8    |
| E. Keaslian Penelitian.....              | 8    |
| F. Metode Penelitian.....                | 12   |
| 1. Tipe Penelitian .....                 | 12   |
| 2. Pendekatan Penelitian .....           | 12   |
| 3. Sumber Penelitian.....                | 13   |
| 4. Analisis Bahan .....                  | 14   |

|   |    |
|---|----|
| BAB II MAKNA NEGARAWAN SEBAGAI SYARAT HAKIM<br>KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA<br>REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .....       | 16 |
| A. Tinjauan Pustaka.....  | 16 |
| 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....  | 16 |
| 2. Bahasa Perundang-undangan .....  | 18 |
| 2.1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional.....  | 18 |
| 2.2. Bahasa Hukum Indonesia.....  | 19 |
| 3. Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<br>yang Baik .....   | 21 |
| 3.1. Menurut Para Ahli .....  | 21 |
| 3.2. Menurut Undang-Undang .....  | 24 |
| 4. Teori Penafsiran.....  | 27 |
| 4.1. Teori Penafsiran secara Umum .....   | 28 |
| 4.2. Teori Penafsiran Konstitusi .....  | 30 |
| B. Analisis.....  | 35 |
| 1. Pengertian Syarat Negarawan .....  | 36 |
| 2. Kriteria Negarawan .....   | 44 |
| 3. Kaitan Bahasa Hukum dan Makna Negarawan.....   | 47 |
| 4. Kaitan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-<br>undangan yang Baik dan Makna Negarawan .....                                    | 48 |
| 5. Posisi Syarat Negarawan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 ...   | 50 |
| BAB III PERWUJUDAN NEGARAWAN SEBAGAI SYARAT HAKIM<br>KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA<br>REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ..... | 52 |
| A. Tinjauan Pustaka.....  | 52 |
| 1. Pengertian dan Syarat Hakim .....  | 52 |



|  |    |
|--|----|
| 2. Syarat Hakim Konstitusi di Indonesia .....                                | 57 |
| 3. Syarat Hakim Konstitusi di Berbagai Negara .....                          | 59 |
| B. Analisis.....   | 64 |
| 1. Perwujudan Syarat Negarawan Menurut Ahli.....                             | 64 |
| 2. Perwujudan Syarat Negarawan dan Konsep Hakim .....                        | 67 |
| 3. Perwujudan Syarat Negarawan dan Sifat Putusan<br>Mahkamah Konstitusi..... | 69 |
| 4. Perwujudan Syarat Negarawan pada Pasal 24C UUD NRI<br>1945 .....          | 69 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 73 |
| A. Kesimpulan.....   | 73 |
| B. Saran.....  | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 76 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel Perwujudan Syarat Negarawan ..... | 70 |
|---|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, tentu seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur, dilandaskan, dan tunduk pada tatanan hukum. Hukum sebagai pengatur hubungan bersama manusia dalam menjalankan fungsinya harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda.

Secara garis besar, proses hukum itu meliputi pembuatan hukum dan penegakan hukum. Pembuatan hukum yang dimaksud disini samadengan pembuatan undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum merupakan awal bergulirnya proses pengaturan yang merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum, ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dan “dunia hukum”.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, pembuatan hukum melalui berbagai tahap dengan memperhatikan beberapa hal penting sehingga dapat diterima dan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 176.

bernegara. Montesquieu mengemukakan gagasannya mengenai bagaimana seharusnya hukum itu dibuat sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan.
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat.
3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis.
4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekadar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
6. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah; tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Pembuatan hukum juga tidak terlepas dari penggunaan bahasa, karena hukum abad ke-20 pada dasarnya merupakan hukum yang dituliskan (perundang-undangan), sehingga penggunaan bahasa memegang peranan penting dalam memahami dan menegakkan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, terdapat dua fungsi penggunaan bahasa dalam pembuatan hukum yaitu sebagai sarana komunikasi dan sebagai suatu ragam teknik. Bahasa sebagai sarana komunikasi berarti bahasa perundang-undangan harus dapat mengantarkan pikiran dan

---

<sup>2</sup> Montesquieu dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 180

kehendak pembuat undang-undang kepada rakyat, sementara bahasa sebagai ragam teknik berarti bahasa perundang-undangan menjadi sarana komunikasi diantara para ahli hukum, di sini istilah-istilah dirumuskan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, dalam pembuatan hukumnya tentu harus memperhatikan hal-hal tersebut, agar hukum itu dapat ditegakkan atau dijalankan dengan baik. Dalam prosesnya, Indonesia telah mengkomodir gagasan-gagasan tersebut dalam proses pembuatan hukumnya, hal ini dibuktikan dengan telah diundangkannya sebuah instrumen hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan; keseimbangan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Idealnya seluruh peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan asas-asas tersebut. Peranan asas hukum sangat penting

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 87-89, mengenai fungsi bahasa sebagai ragam teknik, Satjipto mengutip gagasan dari Algra dan Jansen.

sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, ialah rasio logisnya.<sup>4</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis dan hierarki tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan Instrumen hukum tertinggi sehingga sekaligus menjadi pijakan utama untuk melihat bentuk instrumen hukum ideal yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Secara historis, UUD NRI 1945 telah empat kali mengalami perubahan dalam periode tahun 1999-2002, dalam proses perancangan konstitusi hingga proses perubahan tersebut terjadi dinamika yang sangat panjang serta melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan konstitusi terbaik bagi Indonesia. Jika diperhatikan naskah

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, dalam Nurhadiantomo, "Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat", PRANATA HUKUM, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2006, hlm. 7.

komprehensif yang mencatat risalah sidang MPR terkait Perubahan UUD NRI 1945, maka dapat diketahui bahwa pemilihan kata, frasa, atau klausul kata (bahasa) menjadi pembahasan yang menarik, ini dikarenakan penggunaan bahasa ini sedapat mungkin diharapkan dapat diterima secara jelas sehingga tidak terjadi penafsiran yang beragam (*multitafsir*).

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sejatinya keadaan ideal adalah manakala interpretasi (penafsiran) tidak diperlukan atau sangat kecil peranannya, hal ini bisa tercapai apabila peraturan perundang-undangan bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas.<sup>5</sup> Ukuran kejelasan ini dapat dilihat dengan memperhatikan syarat yang diajukan Montesquieu pada bahasan sebelumnya dan terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam kenyataannya, UUD NRI 1945 yang ada saat ini beberapa kali *multitafsir* sehingga Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 beberapa kali pula harus melakukan penafsiran terhadap maksud bahasa yang digunakan dalam UUD NRI 1945.

Salah satu rumusan terkait penggunaan bahasa dalam UUD NRI 1945 yang menarik untuk diperhatikan terdapat pada Pasal 24C Ayat (5), pasal tersebut berbunyi, “Hakim konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara,”

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.<sup>6</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK). Seharusnya seluruh ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD NRI 1945 dapat terjabar secara jelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun setelah memperhatikan ketentuan di dalam undang-undang tersebut, masih terdapat ketentuan yang tidak terjabar secara jelas, salah satunya yaitu ketentuan dalam Pasal 15.

Dalam Pasal 15 UU MK yang mengatur mengenai syarat hakim konstitusi, terdapat kata “negarawan” yang tidak memiliki penjelasan makna dan ukuran yang jelas, sehingga tentu akan menyulitkan dalam perwujudan atau pelaksanaannya, padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa perundang-undangan harus jelas, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan sebagai bagian dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

<sup>6</sup>Perhatikan Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI 1946.



Pembahasan mengenai makna “negarawan” dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 15 UU MK sangat penting karena ini berkaitan dengan syarat Hakim Konstitusi yang nantinya akan mengawal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang posisinya sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan proposal penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana perwujudan negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui makna negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mengetahui perwujudan negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Secara umum, untuk memberikan manfaat melalui sumbangsi pemikiran dan saran akademis demi penyempurnaan, perkembangan, dan pembangunan hukum di bidang ketatanegaraan. Secara khusus, sebagai bahan rujukan untuk perkembangan ilmu hukum di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya pada masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran dan saran bagi Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis mengenai teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Demi menjaga keaslian, orisinalitas penelitian, dan menghindari asumsi plagiasi dalam penelitian, maka penulis telah melakukan

penelusuran terhadap berbagai literatur, dan tidak menemukan penelitian lain dengan objek penelitian yang sama. Namun, terdapat beberapa penelitian yang objek penelitiannya membahas mengenai hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Hadi Herlambang Prabowo<sup>7</sup>, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015, dengan judul penelitian “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada penelitian ini dibahas mengenai Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang tugasnya berkaitan dengan pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yang salah satu kewenangannya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa, hakim konstitusi tidaklah termasuk hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa, badan pengawas atau panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat ini, hakim yang dapat diawasi secara eksternal oleh Komisi Yudisial hanyalah hakim pada lingkup peradilan Mahkamah

---

<sup>7</sup> Hadi Herlambang Prabowo, 2015, “*Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Agung tidak termasuk hakim konstitusi. Padahal ketika pembahasan rapat PAH I BP MPR tentang Amandemen UUD 1945 bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah mencakup seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi dan tidak ada pembedaan istilah hakim. Maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI 1945 yang kelima untuk mewujudkan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial.

Kedua, penelitian oleh Abid Musaddad<sup>8</sup>, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi". Pada penelitian ini dikaji mengenai Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) bekerja jika ada hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan terkait dan berbagai pemberitaan di media, maka Mahkamah Konstitusi dianggap minim pengawasan. Satu-satunya pengawasan yang ada yaitu pengawasan Internal oleh MKHK. Maka penelitian ini, terfokus pada kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Ketiga, penelitian oleh Jevon Rainhard Berhito<sup>9</sup>, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul penelitian "Kajian

---

<sup>8</sup>Abid Musaddad, 2016, *"Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

<sup>9</sup>Jevon Rainhard Berhito, 2015, *"Tinjauan Yuridis Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan*

Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)". Pada penelitian ini dikaji mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah, Berbicara mengenai kewenangan mahkamah konstitusi hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal tersebut tidaklah disebutkan wewenang Mahkamah konstitusi sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sehingga kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah merupakan wewenang Mahkamah Agung. Pada Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, penelitian ini terfokus mengkaji putusan tersebut untuk mengetahui apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan Umum pemilu kepala daerah.

Setelah penelusuran yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga orisinalitas dan kebaruan penelitian ini dapat dijamin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya.<sup>10</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hlm. 93.

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, terutama mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan penafsiran hukum.

Pada penelitian ini juga digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu, pendekatan dengan membandingkan Syarat Hakim Konstitusi di beberapa negara di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Pendekatan komparatif ini dilakukan pada Austria, Chili, Kolumbia, Spanyol, Turki, dan Republik Dominika dengan melihat syarat hakim konstitusi pada konstitusinya masing-masing.

### **3. Sumber Penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat, yang terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Analisis Bahan**

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian akan diolah dan dianalisis secara mendalam, sehingga diperoleh *ratio logis* mengenai persoalan



hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada, sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**

**MAKNA NEGARAWAN SEBAGAI SYARAT HAKIM KONSTITUSI**

**DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 1945**

**A. Tinjauan Pustaka**

**1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, oleh karena itu seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi dan tunduk pada tatanan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjalani serangkaian proses hukum yang secara garis besar terbagi menjadi dua proses yakni proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum.

Proses pembuatan hukum ini menurut Satjipto merupakan pemisah antara keadaan tanpa hukum dan keadaan yang diatur hukum.<sup>12</sup> Proses pembuatan hukum ini melibatkan berbagai aktivitas yang kualitasnya berbeda-beda, misalnya antara Pembuatan Konstitusi dengan pembuatan Undang-undang biasa jelas berbeda, namun pada dasarnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik konstitusi maupun instrumen hukum di bawahnya harus memperhatikan cara membentuknya.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 176.

Menurut Burkhard Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan negara (*staatsliche Rechtssetzung*) menyangkut beberapa hal diantaranya: isi peraturan, bentuk dan susunan peraturan, metoda pembentukan peraturan, serta prosedur dan proses pembentukan peraturan.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa hal penting yang salah satunya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut Montesquieu bahwa, orang-orang yang membuat undang-undang sebaiknya memperhatikan dengan seksama cara membentuknya, sebaiknya susunannya ringkas, bahasanya sederhana, dan menarik gagasan yang sama pada setiap orang, undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dibuat untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa.<sup>14</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan karena kebutuhan masyarakat modern sudah demikian luas dan banyak seginya, sehingga potensi konflik kepentingan juga kian besar. Pada masyarakat di masa lampau yang belum pesat perkembangan dan kemajuannya seperti pada masyarakat adat, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, pesan leluhur, lukisan atau lambang, maupun pepatah atau peribahasa, keadaan itu tentu berbeda pada masyarakat modern yang cenderung

---

<sup>13</sup>Maria Farida, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Jakarta, hlm. 252.

<sup>14</sup>Montesquieu (ed.), 1977, *The Spirit of Laws*, diterjemahkan oleh M. Khoirul Anam, 2015, Nusa Media, Bandung, hlm. 361.

berpikir lebih konkrit.<sup>15</sup>Hal inilah yang mendasari perlunya membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkrit sehingga dapat mengatur kehidupan bersama dengan baik.

Indonesia sebagai negara hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan ukuran dan cara baku untuk membentuk peraturan perundang-undangan, memuat cara dan prosedur, asas-asas, materi muatan, dan sebagainya. Keberadaan undang-undang ini menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dan perancang undang-undang dalam membuat sebuah instrumen hukum. Di dalam undang-undang ini juga, diatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.<sup>16</sup>

## **2. Bahasa Perundang-undangan**

### **2.1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional**

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 36 UUD NRI 1945. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia, karena bahasa ini merupakan bahasa yang mempersatukan berbagai macam suku, adat, kebudayaan, dan

---

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 18.

<sup>16</sup>Lihat Pasal 7 UU.No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bahasa masing-masing. Sudah sejak tahun 1928 para wakil pemuda dari berbagai suku bangsa dan golongan menyatukan diri dalam sebuah ikrar, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu keberagaman bahasa dan dialeg di Indonesia, merupakan bahasa ilmu pengetahuan, dipakai dalam lembaga pendidikan dan pengajaran, juga dari kota hingga pelosok tanah air. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Ia tidak sekadar bahasa yang berakar dari bahasa melayu tetapi telah bertransformasi menjadi pohon bahasa, yang memiliki dahan, cabang, dan ranting yang bervariasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Pertemuan dan penerimaan terhadap istilah-istilah asing (bahasa serapan) telah memperkaya dirinya tidak saja untuk digunakan dalam berkomunikasi, tetapi juga memahami ilmu pengetahuan menurut kekhususannya masing-masing diantaranya adalah, bahasa hukum Indonesia yang mempunyai karakteristik sendiri.<sup>18</sup>

## **2.2. Bahasa Hukum Indonesia**

Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya

---

<sup>17</sup> Muh Koesnoe dalam Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.1

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 2.

mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia.<sup>19</sup>

Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasanya dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat, namun karena bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia, maka penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat ektitika bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

Satjipto berpendapat bahwa, terdapat dua fungsi penggunaan bahasa dalam pembuatan hukum yaitu, sebagai sarana komunikasi dan sebagai suatu ragam teknik. Bahasa sebagai sarana komunikasi berarti bahasa perundang-undangan harus dapat mengantarkan pikiran dan kehendak pembuat undang-undang kepada rakyat, sementara bahasa sebagai ragam teknik berarti bahasa perundang-undangan menjadi sarana komunikasi di antara para ahli hukum, di sini istilah-istilah dirumuskan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

Bahasa hukum yang dipergunakan saat ini masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Bahasa hukum menjadi penting untuk dipelajari berdampingan dengan Bahasa Indonesia

---

<sup>19</sup>Badan Pembina Hukum Nasional dalam Hilman Hadikusuma, *Ibid.*

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm 87-89.

umum, agar dapat saling mengisi kekurangan. Mempelajari asas-asas dan kaidah bahasa Indonesia bertujuan untuk mengatasi kekurangsempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum saat berbicara atau mengemukakan pendapat hukum, membuat karangan ilmiah hukum, membuat aturan-aturan, surat pengaduan, tuduhan, gugatan, kesaksian, keputusan, akta-akta, perjanjian, dan sebagainya.

### **3. Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik**

#### **3.1. Menurut Para Ahli**

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diantaranya yaitu, I.C Van Der Vlies yang membagi asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas formal dan material sebagai berikut:<sup>22</sup>

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- 5) Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids-beginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

---

<sup>22</sup> Maria Farida, *Op.cit.*, hlm. 253-254.

Sementara A. Hamid S. Attamimi menyebutnya asas-asas perundang-undangan yang patut. Tidak jauh berbeda dengan pendapat I.C Van Der Vlies, A. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ke dalam asas yang formal dan asas yang material sebagai berikut:<sup>23</sup>

Asas-asas formal, dengan perincian:

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) Asas materi muatan yang tepat;
- 5) Asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) Asas dapatnya dikenali.

Asas- asas material, dengan perincian:<sup>24</sup>

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Melalui pendekatan yang berbeda, Jeremy Bentham mengemukakan mengenai ketidaksempurnaan (*unperfections*) yang dapat mempengaruhi undang-undang dan dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidaksempurnaan tersebut dibagi dalam dua derajat atau tingkatan yaitu, pada derajat pertama meliputi arti ganda (*ambiguity*), kekaburan (*obscurity*), dan terlalu

---

<sup>23</sup>Maria Farida, *Ibid.*, hlm 254.

<sup>24</sup>Lihat penjelasan Maria Farida, 2014, *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 255. Cita hukum Indonesia dan norma fundamental tidak lain adalah Pancasila dan sila-silanya yang berlaku sebagai norma. Asas negara berdasar hukum menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*). Asas pemerintahan berdasarkan konstitusi menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.



luas (*over butkines*). Pada derajat kedua meliputi, ketidaktepatan ungkapan (*unsteadines in respect of expression*), ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadines in respect of import*), berlebihan (*redundancy*), terlalu panjang lebar (*long in dedness*), membingungkan (*entalement*), tanda-tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of helps to intellection*), dan ketidakteraturan (*disordsliness*).<sup>25</sup>

Sementara Lon. L. Fuller memandang dari sudut pandang pembentuk peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentuknya akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memperhatikan asas-asas yang diambilnya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad-hoc*.
- b. Peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

---

<sup>25</sup>Jeremi Bentham dalam Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 128.

<sup>26</sup>Lon.L Fuller dalam Achmad Ruslan, *Ibid*.

### 3.2. Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

27

Rumusan penjelasan mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

---

<sup>27</sup>Lihat Pasal 5 Undang-Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

<sup>28</sup>Lihat Penjelasan Pasal 5 pada UU.No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Penjelasan dapat dilihat juga pada Salim HS (ed.), 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 43.

- e. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihankata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU No. 12 tahun 2011 juga diatur mengenai asas yang mencerminkan materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>29</sup>

Rumusan penjelasan asas-asas yang mencerminkan materi muatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

<sup>30</sup>Lihat Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dikemukakan di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai

dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>31</sup>

#### 4. Teori Penafsiran

Marion J. Levi mengatakan bahwa *“people who can’t define their terms don’t know what they are talking about,”* lebih lanjut Thomas Hobbes menegaskan bahwa *“all laws, written and unwritten, have need of interpretation”*.<sup>32</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwa interpretasi atau penafsiran terhadap suatu istilah merupakan sesuatu yang penting. Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan manusia harus dapat ditegakkan dan dilaksanakan, untuk dapat menegakkan atau melaksanakannya maka undang-undang harus diketahui orang, agar dapat memenuhi asas “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” maka peraturan perundang-undangan harus tersebar dan jelas maknanya.<sup>33</sup>

Dalam kenyataannya, tidak semua kata, istilah, dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dinyatakan dengan tertulis dalam bentuk perundangan itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh karenanya di dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah penafsiran atau interpretasi.

---

<sup>31</sup> Michael Zander dalam Achmad Ruslan (ed.), *Op.cit.*, hlm. 211.

<sup>32</sup> Astim Riyanto, 2009, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, hlm. 670-671. Maksud Marion J. Levi yaitu “orang-orang yang tidak dapat mendefinisikan istilah-istilah mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan”, sementara maksud dari perkataan Thomas Hobbes bahwa “semua hukum, tertulis dan tidak tertulis, membutuhkan interpretasi atau penafsiran”.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 168.

Penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>34</sup>

#### **4.1. Teori Penafsiran secara Umum**

Secara umum disebutkan ada empat metode penafsiran yang digunakan atau dilakukan oleh hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis-sosiologis. Dalam berbagai literatur ditemukan pula metode penafsiran lain yang secara keseluruhan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Penafsiran gramatikal (tata Bahasa), yakni memberi arti suatu aturan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau dengan cara mempelajari dan menggunakan hubungan kalimat
- b. Penafsiran sistematis, yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan mengaitkan pada pasal-pasal lain dalam kerangka satu tata

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo (ed.), 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 157. Lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm 170-173, pada literatur ini Sudikno menambahkan 3 jenis penafsiran yaitu Penafsiran komparatif, futuristis, serta restriktif dan ektensif, hal berbeda juga dapat dilihat pada Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 99-109 dan Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 21-26 yang menambahkan jenis penafsiran otentik.

hukum atau dengan cara mempelajari sistem dan rumusan undang-undang.

c. Penafsiran historis (sejarah), yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, penafsiran ini dibedakan atas:

1) Penafsiran sejarah hukum (*rechtshistoires interpretatie*). Pada penafsiran ini, hakim memberi memberi arti aturan hukum dari perkembangan lembaga hukum dan figur hukum (pranata hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan absolut, pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dapat ditelusuri melalui sejarah peradilan administrasi Perancis.

2) Penafsiran sejarah undang-undang (*wets historische interpretatie*). Pada penafsiran ini, makna suatu ketentuan dicari berdasarkan maksud pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya, interpretasi ini mengambil sumbernya dari risalah pembahasan atau pembicaraan pada saat suatu produk hukum dibentuk.

d. Penafsiran teleologis/sosiologis, memberi arti suatu aturan hukum berdasarkan tujuan kemasyarakatan, penafsiran ini memperhatikan perbedaan situasi sosial masyarakat pada saat undang-undang dibentuk dan situasi sosial masyarakat saat ini.

- e. Penafsiran komparatif, yaitu memberi arti suatu aturan hukum dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum lain.
- f. Penafsiran futuristis (antisipatif), yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan mengacu pada rumusan dalam RUU atau rumusan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
- g. Penafsiran restriktif, yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan membatasi cakupan ketentuan itu.
- h. Penafsiran ekstensif, yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan memperluas cakupan sebuah ketentuan.
- i. Penafsiran otentik, yakni memberi arti suatu aturan hukum dengan memperhatikan batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan, rumusan ketentuan umum, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.

#### **4.2. Teori Penafsiran Konstitusi**

Penafsiran atau interpretasi konstitusi diartikan sebagai upaya untuk memberikan arti atau makna yang dipandang tepat terhadap pasal-pasal dalam konstitusi, hal ini sejalan dengan pendapat L.B. Curson bahwa, "*Interpretation refers generally to the assigning of meaning to word in a statute*".<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>I Dewa Gede Atmadja (*et.al*), 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.hlm. 71.



Penafsiran konstitusi dibutuhkan dengan sejumlah alasan atau pertimbangan:<sup>37</sup>

- 1) Penafsiran konstitusi melibatkan penemuan prinsip-prinsip dan nilai-nilai politik fundamental sebuah bangsa, usaha tersebut pada intinya normatif. Dikatakan oleh Miller dan Howell, prinsip-prinsip konstitusi tidak “netral”. Prinsip-prinsip dalam konstitusi melarang jenis-jenis tindakan tertentu, seperti pencabutan kebebasan.
- 2) Pesan inti dari naskah konstitusi harus jelas dan otoritatif. Ketika “kata-kata kehilangan maknanya”, naskah konstitusi menjadi tidak lebih dari sekadar artifak budaya, sepenggal literatur yang tidak mesti sangat baik. Konstitusi tidak memiliki otoritatif dan mungkin menjadi tidak lebih dari sekadar tingkah laku manusia yang berkuasa.
- 3) Dalam inti makna konstitusi mungkin tersembunyi sekumpulan isu yang dapat dan memang dipertentangkan. Prinsip-prinsip dan bahkan aturan-aturan jarang memberi hanya satu jawaban yang jelas (benar) sehingga menimbulkan ketidaksepakatan.
- 4) Penafsiran konstitusi tidak sekadar ke arah yang menguntungkan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, walaupun penafsiran akan lebih menguntungkan beberapa orang dibandingkan yang lainnya, tetapi kebaikan jangka panjang bangsa sebagai satu keseluruhan. Penafsiran konstitusi didasarkan pada sebuah inti dari nilai-nilai yang diterima, menjadi kabur dan batas-batasnya dapat dipertentangkan, penafsiran konstitusi mesti melibatkan debat yang harus diadakan, setidaknya sebagian besar dalam forum-forum publik. Keputusan-keputusan penting harus dibenarkan secara publik. Teori demokrasi menuntut pada akhirnya “rakyatlah yang menilai”.

Ada lima sumber untuk memandu melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap konstitusi, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Teks dan struktur konstitusi;
- b. Maksud perancang konstitusi;

---

<sup>37</sup> Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 672.

<sup>38</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit.*, hlm. 71

- c. Putusan hakim terdahulu, lazimnya badan peradilan;
- d. Konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi suatu penafsiran alternatif;
- e. Hukum alam, yang dipandang sebagai “hukum tertinggi yang bersumber dari hukum tuhan.

Di bawah ini, dikemukakan beberapa pandangan ahli hukum mengenai Penafsiran Konstitusi yaitu:<sup>39</sup>

Pertama, Edger Bodenheimer membedakan penafsiran konstitusi secara dikotomis, yaitu teori penafsiran historis (*theory of historical interpretation*), dan teori penafsiran kontemporer (*contemporaneous interpretation*). Kedua teori penafsiran konstitusi tersebut pernah diterapkan secara kontroversial oleh hakim-hakim agung Amerika Serikat. Roger Taney (Ketua *Supreme Court* Amerika Serikat) dalam kasus *Dred Scot. v. Standford*, berpendapat bahwa dalam menafsirkan yakni memberi arti ketentuan-ketentuan konstitusi harus diberi makna seperti pada waktu konstitusi itu ditetapkan. Sementara di sisi lain Chief Justice John Marshall (Ketua *Supreme Court*, yang gigih menjaga konstitusi melalui doktrin *yudisial review*) dalam kasus *Mc. Culloch v. Maryland*, berpendapat bahwa konstitusi Amerika Serikat dimaksudkan untuk bertahan lama dalam perkembangan zaman, konsekuensinya harus beradaptasi menghadapi berbagai krisis masalah manusia.

Kedua, Jimly Asshiddiqie mengemukakan teori penafsiran konstitusi berdasarkan pengalaman Konstitusi Amerika Serikat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 75-77

- a. Teori formalisme dan instrumentalisme. Gagasan pokok teori ini berkenaan dengan: (a) pengambilan keputusan melalui *deductive reasoning* dari *precedent*, (b) abstraksi dan generalisasi, (c) pilihan asas-asas umum, (d) kualitas konsep kehendak, yakni: (i) jika parlemen/badan legislatif menyetujui suatu Undang-undang berarti mereka melaksanakan kehendak rakyat atau kedaulatan rakyat, (ii) jika para pihak (swasta) mengikatkan diri pada kontrak, berarti mereka melaksanakan kehendak tersebut, (iii) tanggung gugat atas kontrak, (iv) tanggung gugat atau perbuatan melanggar hukum, dan (v) pembedaan yang tajam antara sektor publik dan sektor privat.
- b. Teori realisme hukum. Teori ini berkembang sejak tahun 1950-an dengan dasar dasar pemikiran, (a) penyesuaian peraturan-peraturan hukum dengan konteks ekonomi, (b) pelaksanaan peradilan sesuai dengan perkembangan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), (c) ekletisme etika dan adat istiadat sebagai sumber nilai.
- c. Teori *post realis*. Teori ini dikatakan sebagai teori kontemporer atau teori proses, karena memberi makna kepada konstitusi secara dinamis. Gagasan pokoknya mengandung ciri-ciri: (a) kontradiksi-kontradiksi fundamental, termasuk diskresi, (b) tesis-tesis indeterminasi, dan (c) fungsi-fungsi ideologis dari wacana hukum. Dasar pemikiran *post realis* adalah penyesuaian norma-

norma konstitusi dengan perkembangan nilai-nilai etika, adat-istiadat, dan perkembangan sosial ekonomi dengan tekanannya pada dasar pemikiran ilmiah dari perkembangan ilmu dan teknologi.

Mengenai cara penafsiran konstitusi, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa panafsiran konstitusi dapat dilakukan dengan penafsiran sejarah atau penafsiran historis. Dengan penafsiran sejarah dilakukan usaha mencari maksud rumusan dalam konstitusi dengan meneliti latar belakang perumusan norma konstitusi tersebut, alam pikiran yang dianut oleh para perumusanya, situasi sosial ketika norma itu dirumuskan, serta formasi-formasi kekuatan politik di dalam badan yang merumuskannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 678.

## B. Analisis

Bahasa hukum memiliki posisi yang penting dalam mengimplementasikan suatu produk hukum. Secara teoritis telah dijelaskan bahwa suatu produk hukum dalam penggunaan bahasanya harus jelas sehingga dapat diimplementasikan dan tidak menimbulkan multitafsir. Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat maknanya merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara Yuridis, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dapat diketahui bahwa terdapat asas “kejelasan rumusan” yang berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan pilihan kata atau istilah, dalam hal ini harus memperhatikan bahasa hukum sehingga dapat dimengerti dan tidak menimbulkan multitafsir, hal ini juga tentu akan berkaitan dengan asas “dapat dilaksanakan”, karena tanpa kejelasan rumusan, juga tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan tersebut.<sup>41</sup>

Pada Pasal 15 UU MK, terdapat syarat negarawan Hakim Konstitusi yang dalam penjelasan undang-undang tersebut tertulis “cukup jelas”.<sup>42</sup> Padahal dalam pelaksanaannya, pengertian negarawan sangat penting mengingat hal tersebut merupakan salah satu syarat pengisian

---

<sup>41</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>42</sup> Lihat Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

jabatan Hakim Konstitusi. Bahkan dalam UUD NRI 1945, Hakim Konstitusi merupakan satu-satunya jabatan yang disematkan syarat negarawan. Dalam rangka mengetahui makna negarawan diperlukan penafsiran atau interpretasi, yang pada akhirnya untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Penafsiran otentik mengenai makna negarawan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tidak ditemukan dalam UU MK, oleh karena itu diperlukan metode penafsiran lain untuk mengetahui makna negarawan sebagai syarat hakim konstitusi. Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh penafsiran atau makna negarawan melalui berbagai penelusuran, baik melalui penafsiran secara gramatikal, maupun melalui pendapat ahli berdasarkan penafsiran sosiologis dan futuristik serta melalui penafsiran historis berdasarkan sejarah perumusan norma yang memuat kata negarawan dalam UUD NRI 1945.

## **1. Pengertian Syarat Negarawan**

Membahas mengenai negarawan tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai salah satu syarat hakim konstitusi, oleh karena itu sebelum memahami mengenai konsep dan makna negarawan. Maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai pengertian syarat. Syarat menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki), dapat pula diartikan sebagai ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka syarat jika dikaitkan dengan

istilah negarawan sebagai salah satu syarat hakim konstitusi, berarti menjadikan negarawan sebagai suatu yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi hakim konstitusi. Membahas mengenai negarawan sebagai syarat hakim konstitusi, maka penting untuk memahami konsep dan kriteria negarawan agar syarat tersebut dapat dibaca dan dimengerti oleh pelaksana undang-undang dan agar memiliki standar dalam perwujudannya.

Konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan. Salah satu karya Plato adalah *The Statesman* atau *Politikos*. Di dalam karya tersebut terdapat dialog antara Socrates dan Theodorus yang bermaksud menyajikan pemikiran bahwa untuk memerintah diperlukan kemampuan khusus (*gnosis*) yang hanya dimiliki oleh negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara.<sup>43</sup> Negarawan juga tidak dapat dilepaskan dari Pandangan Aristoteles dalam karyanya berjudul *Politeia*, Aristoteleslah yang pertama-tama menyatakan bahwa manusia itu makhluk politik atau *zoon politicon*, dalam konteks Yunani Kuno waktu itu dikenal adanya *Polis* atau negara kota yang tidak dapat dilepaskan dari cara pemimpin mengambil suatu kebijakan (*policy*).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Janedjri M. Gaffar, "Hakim Konstitusi dan Negarawan", Harian Seputar Indonesia, Kamis 14 Agustus 2008. (Opini)

<sup>44</sup>Zumri Bestado Sjamsuar, "Grand Teori Politik Negarawan", Jurnal Varia Bina Civika No. 75, Tahun 2009.

Secara filosofis, Edmund Burke, seorang pemikir politik Inggris abad ke-18 sebagaimana dikutip oleh Danang Hardianto menyatakan bahwa, perbedaan besar antara negarawan sejati dan penipu adalah bahwa negarawan melihat masa depan atau berpikir jangka panjang serta bertindak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan untuk keabadian, sedangkan penipu hanya melihat masa kini dan bertindak berdasarkan ketidakadilan dan *immoralitas*.<sup>45</sup>

Secara Harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negarawan merupakan ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Sementara, Negarawan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*statesman*” atau “*statepeople*”. Sementara menurut kamus Merriam-Webster, negarawan (*statesman*) adalah orang yang berpengalaman/ahli mengenai prinsip-prinsip atau seni menjalankan pemerintahan (*one versed in the principles or art of government*); orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan (*one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies*); atau seorang

---

<sup>45</sup> Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 324.



pemimpin politik yang arif atau bijak, cakap, dan terhormat (*a wise, skillful, and respected political leader*).<sup>46</sup>

Menurut konsep kearifan atau kebudayaan Jawa, sebagaimana ditulis Indi G. Khakim yang dikutip oleh Didik Sukriono, negarawan ditandai dengan empat sifat utama (*Catur Kamulyaning Narpati*). Empat sifat utama itu adalah: (1) *Jalma Sulaksana*, artinya seorang pemimpin hendaknya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, agama dan spiritual baik teori maupun praktik; (2) *Praja Sulaksana*, artinya mempunyai perasaan belas kasihan kepada rakyat dan berusaha mengadakan perbaikan pada kondisi masyarakat; (3) *Wirya Sulaksana*, artinya berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar dan takut karena salah; dan (4) *Wibawa Sulaksana*, artinya memiliki kewibawaan terhadap rakyat sehingga perintahnya dijalankan dan program yang direncanakan dapat terealisasi.<sup>47</sup>

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan yang berkaitan dengan proses perumusan syarat negarawan, dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR), telah diusulkan berbagai usulan mengenai syarat Hakim Konstitusi yang akan mengisi lembaga bernama Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu

---

<sup>46</sup>AB Ghoftar, "Menyederhanakan Negarawan" *Majalah Konstitusi* Nomor 121, Maret 2017, hlm. 8.

<sup>47</sup>Didik Sukriono, "Pengawasan dan Pengawasan Hakim Konstitusi sebagai Upaya Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi RI", dalam Dri Utari Christina (*et.al*)(ed.), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI (Naskah Konferensif Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konsitusional Warga Negara*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 414-415.

syarat negarawan. Materi Rancangan Perubahan UUD NRI 1945 yang disiapkan oleh Badan Pekerja MPR RI telah memasukkan syarat negarawan sebagai usulan, begitupun usulan dari F-PBB yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva, usulan mengenai syarat negarawan juga disampaikan tim Ahli PAH I BP MPR oleh Jimmly Asshiddiqie, namun ada juga sebagian anggota yang mengusulkan agar syarat negarawan diganti dengan rumusan lain karena khawatir tidak ada pengertian pasti. Bahkan dikhawatirkan syarat negarawan menjadi beban dalam pemilihan Hakim Konstitusi.<sup>48</sup> Markus Daniel Wakkary dari F-UG misalnya mengemukakan bahwa,

“Di Republik kita ini sulit sekali mencari negarawan seperti ini, yang tidak tercela. Siapa negarawan yang bisa memenuhi kriteria ini integritasnya tidak tercela, saya harap kita akan dapatkan. Tapi kita mungkin bisa mengaturnya lebih sederhana lagi, siapa yang mengukir karya negarawan itu, tiga orang itu dalam ukuran kita sekarang itu yang seperti apa negarawan itu?”<sup>49</sup>

Di sisi lain, terdapat pendapat yang mempertahankan syarat negarawan. Jakob Tobing dari F-PDI Perjuangan yang juga merupakan Ketua PAH I BP MPR menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki kekhasan tersendiri sesuai kebutuhan pembentukan dan wewenangnya, posisinya sentral dan strategis dalam penyelenggaraan negara sehingga syarat hakimnya pun harus berbeda, menurutnya syarat negarawan merupakan syarat yang tepat untuk Hakim Konstitusi. Begitupun oleh

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Baca juga pada Janedjri M Gaffar, “Hakim Konstitusi dan Negarawan”, *Op.cit*.

<sup>49</sup> *Ibid*.

Mashadi dari F-Reformasi yang menyatakan memilih usulan memasukkan syarat negarawan, menurutnya sifat kenegarawanan ini penting untuk menjaga independensi hakim konstitusi.<sup>50</sup>

Anggota PAH I, KH Yusuf Muhammad memandang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya merupakan lembaga hukum. Walaupun putusannya merupakan putusan hukum, putusan tersebut tidak hanya dilandasi aspek hukum saja namun berbagai aspek kenegaraan lainnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi dibutuhkan Hakim Konstitusi yang tidak sekadar ahli hukum. Menurut Hamdan Zoelva dalam pembahasan tersebut, yang dibutuhkan adalah ahli hukum yang negarawan atau negarawan yang ahli hukum.<sup>51</sup> Perdebatan yang panjang dalam rapat pembahasan perubahan UUD NRI 1945 tersebut akhirnya melahirkan kesimpulan hadirnya sebuah lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi, yang salah satu syarat hakimnya berdasarkan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, nomenklatur negarawan juga pernah ada dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang di dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf f menyatakan bahwa salah satu syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu “Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

kesatuan bangsa”, namun tidak ada ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan makna visi kenegarawanan tersebut.

Para ahli juga menyampaikan pandangannya mengenai makna negarawan. Yudi Latif berpandangan bahwa negarawan adalah orang yang memberikan jiwa-raganya untuk negara, kehidupan sehari-harinya sederhana. Seorang negarawan bisa berdebat dalam forum-forum diskusi untuk memperjuangkan ideologi tapi saling berteman akrab dalam kehidupan sehari-hari, demikianlah cara negarawan menjaga persatuan.<sup>52</sup> Jimmly Asshiddiqie menyatakan bahwa negarawan adalah sosok yang bebas dari kepentingan golongan, bukan politikus. Negarawan harus dilihat secara utuh, tidak hanya karena kepintaran semata namun juga memiliki pengalaman yang cukup.<sup>53</sup> Sedangkan Kwik Kian Gie menyatakan bahwa negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingin menyejahterahkan rakyat secara berkeadilan, sosok negarawan dapat dikenali sejak muda, sadar atau tidak sadar, sosok negarawan sejak muda telah menunjukkan kepeduliannya pada lingkungannya. Negarawan sudah *socially engaged* sejak usia muda, keterikatannya pada anggota masyarakat lainnya sudah sangat kasat mata.<sup>54</sup>

Menurut Janedjri M. Gaffar, wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menempatkannya sentral. Posisi tersebut menentukan *check*

---

<sup>52</sup>Liputan 6, *Ini Perbedaan Politikus dan Negarawan Menurut Yudi Latif*, <http://news.liputan6.com/read/2660337/ini-perbedaan-politikus-dan-negarawan-menurut-yudi-latif> [diakses pada 19 September 2017].

<sup>53</sup>Detik News, *Syarat Hakim Konstitusi Harus Negarawan, Jimly: Bukan Politikus*, <https://news.detik.com/berita/d-3431764/syarat-hakim-konstitusi-harus-negarawan-jimly-bukan-politikus>, [diakses pada 20 September 2017]

<sup>54</sup> Kwin Kian Gie, “Negarawan dan Politikus”, Kompas, Senin, 3 April 2017 (Opini).

*and balances* hubungan kekuasaan, baik dalam organisasi penyelenggara negara, maupun dalam kehidupan berbangsa. Mahkamah Konstitusi berada di antara tiga wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan juga berada di antara cabang kekuasaan negara. Posisi tersebut mengharuskan hakim konstitusi harus selalu objektif, tidak memihak, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam posisi tersebutlah kenegarawanan hakim konstitusi dibutuhkan. Selain harus memiliki pengetahuan yang dalam dan luas tentang konstitusi dan ketatanegaraan, hakim konstitusi juga harus memiliki kepribadian yang tidak tercela.<sup>55</sup> Jadi negarawan ini merupakan kesatuan antara pengetahuan yang dalam dan luas termasuk tentang konstitusi dan ketatanegaraan serta kepribadian yang tidak tercela.

Lebih lanjut Janedjri M. Gaffar berpandangan bahwa negarawan adalah sosok yang mengabdikan kemampuan dan kepribadiannya untuk kemaslahatan masyarakat. Seorang negarawan senantiasa berbuat sesuatu berlandaskan pengetahuan dan kepribadiannya sebagai wujud komitmennya terhadap bangsa dan negara. Komitmen tersebut telah dijalani dan menjadi pengalaman praktis sepanjang karier yang digelutinya serta dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan, tetapi untuk bangsa dan negara. Komitmen itu tentu sangat penting mengingat

---

<sup>55</sup> Janedjri M. Gaffar. "Hakim Konstitusi dan Negarawan". *Op.cit.*

putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat seluruh warga negara dan segenap penyelenggara negara.<sup>56</sup>

## 2. Kriteria Negarawan

Setelah membahas mengenai pengertian negarawan, pertanyaan yang sering terlintas adalah mengenai kriteria seorang negarawan. AB Ghoffar yang merupakan peneliti di Mahkamah Konstitusi mengutip pendapat J. Rufus Fears, sebagaimana dikutip dalam Brett dan Kate Mckay, menyatakan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai negarawan kalau ia memiliki empat kriteria sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Keteguhan prinsip (*bedrock of principles*), yakni bahwa negarawan tidak mudah goyah oleh berbagai godaan. Ia membangun keperibadiannya di atas dasar negara, tidak berubah, mendasarkan pada kebenaran fundamental. Seorang negarawan dapat mengubah strategi dan metodenya, tetapi itu semua dilakukan hanya agar tercapainya tujuan bernegara.
- 2) Moralitas (*moral compass*), yakni bahwa negarawan tidak membuat putusan berdasarkan sekedar jajak pendapat publik, hasil survey atau suara mayoritas. Ia membuat putusannya berdasarkan pedoman moralnya (*moral compass*) sendiri. Dia bukan seorang relativis, ia percaya pada kebenaran hakiki. Ketika sesuatu yang salah, ia jelas mengatakan itu salah dan melakukan segala daya untuk melawan itu. Ketika sesuatu yang benar, dia

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>AB Ghoffar. *Op.cit.*

bersedia untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada dan menyebarkannya. Ia adalah sosok yang berintegritas tinggi. Dia memimpin dengan otoritas moral dan mewakili semua yang terbaik di negaranya.

- 3) Bervisi (visi), yakni bahwa negarawan memiliki visi yang jelas tentang arah negaranya. Dia tahu bagaimana cara membawanya, dan apa yang diperlukan untuk sampai ke sana. Seorang negarawan mampu mengenali masalah yang akan muncul, dan mampu mencari solusi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berpikiran tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang.
- 4) Berjiwa pemimpin, yaitu memiliki kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan atau visinya (*the ability to build a consensus to achieve that vision*).

Meski demikian, Fears mengakui bahwa keempat kriteria tersebut sulit untuk diwujudkan atau didapatkan. Namun jika keempat kriteria itu dimiliki, maka kenegarawanan seseorang tidak lagi diragukan, dan ia akan tercatat namanya dalam tempat tertinggi dalam sejarah.<sup>58</sup> Oleh karena sulitnya menemukan atau mewujudkan keempat kriteria tersebut, AB Ghoffar mengajukan dua syarat minimal yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, dua syarat minimal tersebut yaitu moralitas dan visi. Menurut AB Ghoffar, moralitas dan visi

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

merupakan dua kriteria minimal negarawan yang sekiranya dapat memandu Panitia Seleksi dalam memilih Hakim Konstitusi yang tepat untuk Mahkamah Konstitusi.<sup>59</sup>

O. Notohamidjojo, dalam pidato Dies Natalis Universitas Kristen Satya Wacana tahun 1958 sebagaimana dikutip oleh Danang Hardianto menyatakan bahwa, karakter atau kriteria negarawan yakni memiliki wawasan (*vision and insight*) artinya memiliki pandangan jauh ke depan atau jangka panjang serta memberikan solusi yang terbaik dan berkeyakinan kuat, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi (*strong conviction and self confidence*).<sup>60</sup> Edmund Burke juga mengajukan dua karakteristik dasar negarawan yaitu memiliki kapasitas untuk berpikir jangka panjang (*the statesman has the capacity to think long range*) dan bekerja berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (*the statesman operates on enduring principles*).<sup>61</sup>

Fakta sejarah, pandangan ahli, serta kriteria negarawan yang telah dijelaskan sebelumnya mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa mendapatkan seorang negarawan tidaklah dalam hitungan waktu yang singkat namun dilalui melalui proses yang panjang. Proses itu meliputi pendekatan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, negarawan merupakan kesatuan yang utuh antara pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam, kepribadian yang tidak tercela dan sederhana, serta cita-cita dan komitmen mulia untuk bangsa

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Danang Hardianto, *Op.cit.*, hlm. 325.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 324-325.



dan negara. Jadi syarat negarawan hakim konstitusi tidak dapat dimaknai sebagai sebuah syarat konkret, namun syarat ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dari segala proses di Mahkamah Konstitusi mulai dari proses seleksi (proses pencalonan dan pemilihan) hakim konstitusi, hingga proses penegakan hukum dan keadilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi oleh para hakim konstitusi.

### **3. Kaitan Bahasa Hukum dan Makna Negarawan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahasa hukum memegang peranan penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. bahasa hukum Indonesia merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang dipilih secara khusus menjadi bahasa peraturan perundang-undangan, ini bermakna bahwa tidak semua bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa hukum. Bahasa hukum harus memperhatikan semantik kata, susunan dan komposisi kalimatnya, serta kejelasan makna sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini sejalan dengan gagasan Montesquieu yang mengisyaratkan agar bahasa peraturan perundang-undangan seharusnya menarik satu gagasan yang sama pada setiap orang. Jika dikaitkan dengan kata 'negarawan' maka sejatinya kata ini merupakan bagian dari bahasa Indonesia, namun masih perlu disempurnakan dan dikaji ulang jika ingin dijadikan sebagai bahasa hukum, mengingat gagasan yang ditarik mengenai makna negarawan saat ini masih beragam.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahasa hukum memiliki dua fungsi yakni fungsi komunikasi dan ragam teknik. Fungsi komunikasi bermakna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus dapat menyampaikan pesan yang dapat dibaca atau dimengerti oleh penerima pesan, dalam hal ini antara pembuat dan pelaksana undang-undang. Jika fungsi ini dikaitkan dengan kata 'negarawan', maka sejatinya belum mencerminkan terwujudnya fungsi komunikasi bahasa hukum, karena masih menimbulkan kebingungan bagi pelaksana undang-undang (termasuk panitia seleksi hakim konstitusi) dalam menyeleksi hakim konstitusi. Sementara mengenai fungsi ragam teknik, yaitu bahwa suatu bahasa perundang-undangan mencerminkan bahasa yang dimengerti dan diterima serupa (gagasan yang sama) oleh para ahli hukum. Jika fungsi ini dikaitkan dengan kata 'negarawan', maka fungsi ragam teknik pun belum terwujud karena masih menimbulkan penafsiran yang beragam di antara berbagai kalangan ahli.

#### **4. Kaitan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dan Makna Negarawan**

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembentukan suatu produk peraturan perundang-undangan. Perwujudan asas-asas ini menjadi ukuran baik-tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dalam pembuatan dan penegakannya. Salah-satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni asas

kejelasan rumusan (atau disebut dengan nama lain seperti asas dapatnya dikenali, rumusan yang bisa dimengerti) dan Asas dapatnya dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu produk hukum, meski demikian asas ini tidak dapat serta merta digunakan dalam perumusan konstitusi, karena UUD NRI 1945 memiliki cara dan mekanisme tersendiri dalam perumusannya (termasuk prosedur mengubah dan menetapkan), serta melihat posisi UUD NRI 1945 yang berada pada urutan tertinggi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun meski demikian, jika dikaitkan dengan produk hukum Undang-Undang, maka sejatinya asas ini harus diwujudkan. Jika dikaitkan dengan kata 'negarawan', maka harus diperhatikan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 yang memuat syarat negarawan, begitupun dengan Pasal 15 UU MK yang menjadi ketentuan pelaksanaan dari perintah Pasal 24C UUD NRI 1945. Asas kejelasan rumusan belum tercermin dalam Pasal 15 UU MK yang hanya mengulang kata negarawan pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 tanpa memberikan penjelasan mengenai makna negarawan tersebut, dan unsur-unsur dalam perwujudannya, padahal posisi UU MK seharusnya mampu menjabarkan perintah Pasal 24C UUD NRI 1945 mengenai Mahkamah Konstitusi secara jelas dan konkret. Tidak tercerminnya asas kejelasan rumusan dalam kata 'negarawan' ini juga akan berdampak pada asas dapatnya dilaksanakan, sesuai fakta yang terjadi selama ini bahwa panitia

seleksi cenderung kesulitan dalam memahami makna negarawan sehingga terkendala perwujudannya.

### **5. Posisi Syarat Negarawan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945**

Jika diperhatikan syarat hakim konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI, maka dapat diketahui bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Menurut pandangan penulis, setelah membaca pandangan ahli serta berbagai literatur yang membahas makna negarawan termasuk mengenai konsep negarawan, dapat diketahui bahwa negarawan mencakup makna pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam, kepribadian yang tidak tercela, serta komitmen mulia untuk bangsa dan negara. Maka kata 'negarawan' pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945, mengandung pengertian yang berulang/berlebihan (*redundant*) dengan syarat lain. Syarat negarawan seharusnya menjadi satu abstraksi utama dari keseluruhan syarat hakim konstitusi, mengingat cakupan pengertiannya yang luas dan mendalam, termasuk telah memuat mengenai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan lain.

Menurut analisa penulis, jika syarat hakim konstitusi ingin diabstraksi menjadi satu syarat, maka syarat negarawanlah yang menjadi satu syarat tersebut. Namun penggunaan istilah negarawan

berdampingan dengan syarat lain yang sejatinya merupakan bagian dari makna negarawan, maka komposisi bahasa norma konstitusinya menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan komposisi bahasa konstitusi terhadap Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945, dengan jalan perubahan konstitusi, atau mempertahankan komposisi tersebut sepanjang dimaknai bahwa perwujudan syarat lain secara keseluruhan akan otomatis menjadi perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi.

**BAB III**  
**PERWUJUDAN NEGARAWAN SEBAGAI SYARAT HAKIM**  
**KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**A. Tinjauan Pustaka**

**1. Pengertian dan Syarat Hakim**

Kekuasaan yudikatif merupakan benteng pertahanan utama bagi penegakan hukum, hal ini sejalan dengan pernyataan Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat yang mengatakan bahwa, eksekutif boleh tidak terlegitimasi, legislatif boleh tidak aspiratif, tetapi cukup jika yudikatif bersih dan independen. Pernyataan tersebut bukan berarti bahwa elemen eksekutif dan legislatif boleh berbuat apa saja, tetapi hal tersebut merupakan penegasan bahwa kekuasaan yudikatif memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>62</sup>

Di Indonesia, kekuasaan yang memiliki wewenang mengadili dan memiliki peran sentral penegakan hukum tersebut terletak pada Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945 Bab X tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

---

<sup>62</sup>Henry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 9, Nomor 3 Desember 2012, hlm. 155

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 terdapat konsep *Independency of Judiciary*, yakni kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Konsep ini bersifat universal sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Everyone is entitled in full quality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him*”, yang intinya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar suaranya di muka umum dan di hadapan pengadilan yang merdeka dan tidak memihak.<sup>63</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka (prinsip independensi) tidak dapat dipisahkan dari *checks and balances* yang dianut Indonesia, dan asas negara berdasarkan hukum dan konstitusi (*rule of law and constitutionalism*).<sup>64</sup>

Mengenai Kekuasaan Kehakiman ini dikenal pula istilah hakim, yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai

---

<sup>63</sup> Perhatikan *Article 10, Universal Declaration of Human Rights*.

<sup>64</sup>Hamdan Zoelfa, “Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum KONSIDERATUM UNS*, Vol. 2 tahun 2012.

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>65</sup>

Imam al Mawardi dalam karyanya yang berjudul *al Ahkam as Sultaniyah* (Hukum Tata Negara) berpendapat bahwa, hakim adalah jabatan mulia, seorang hakim harus mengedepankan prinsip kebenaran dalam bertugas. Sementara dalam pengertian umum, hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan bahwa, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>67</sup> Pada Undang-undang tersebut, juga disebutkan mengenai pengertian hakim agung dan hakim konstitusi. Hakim agung adalah hakim

---

<sup>65</sup>Lihat Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>66</sup>Yusuf Assidiq, "Fungsi dan Posisi Hakim", Republika Khazanah, Senin, 3 Januari 2011, Hlm. 18.

<sup>67</sup>Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



pada Mahkamah Agung, sedangkan hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.<sup>68</sup>

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan adalah melaksanakan dan mewujudkan keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu hakim sebagai profesi hukum memiliki sistem etika yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>69</sup>

Mengenai etika profesi hakim ini, Mahfud MD mencoba melakukan pendekatan dari aspek moral, harus diakui bahwa bobroknya peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan eksekutif, tetapi juga dan malah lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral. Penyatuan struktur pembinaan penegak hukum harus dibarengi dengan peningkatan moralitas para penegak hukum, terutama para hakim. Untuk mengawal moral ini, selain perlunya ketentuan rekrutmen yang menjadikan moral sebagai salah satu persyaratan pokok, sejak dini

---

<sup>68</sup>Lihat Pasal 1 Angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>69</sup> H.M Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 100-101.

perlu pula dikembangkan pelajaran etika profesi dalam setiap lembaga pendidikan yang akan melahirkan para penegak hukum.<sup>70</sup>

Penegakan hukum akan selalu beriringan dengan perilaku manusia, hal ini juga tentu berkaitan dengan hakim sebagai bagian penegak hukum. Van Doorn, seorang sosiolog Belanda berpendapat bahwa, terdapat beberapa faktor di luar hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, seperti kepribadian, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi dan politik, serta pandangan hidup.<sup>71</sup> Oleh sebab itu, dalam rekrutmen hakim faktor-faktor tersebut harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada penegakan hukum.

Hakim yang paling baik dan adil tentulah hanya Tuhan. Namun demikian, terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap terdapat kriteria ideal untuk menjadi seorang hakim yang baik, yaitu berwawasan luas, mendalami ilmu hukum, adil, mandiri, dan “bersih”. Hakim seharusnya adalah orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ketat dan unggul, serta yang terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim juga wajib digodok pengalaman *multidimensi* di beragam lapangan, menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun juga, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya. Hakim juga diharapkan selalu mengasah kebijakan, kearifan,

---

<sup>70</sup>Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 102-103.

<sup>71</sup>Mompang L. Panggabean, “Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal”, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2013. Hlm. 45.

serta insting keadilannya untuk menjadikannya tetap peka dalam memutus setiap perkara.<sup>72</sup> Taverne bahkan secara tegas menyatakan bahwa, “berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan Undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil,”.<sup>73</sup>

## **2. Syarat Hakim Konstitusi di Indonesia**

Keberadaan Hakim Konstitusi di Indonesia diakui secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman, secara khusus diatur dalam Pasal 24C yang memuat pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (5) memuat kualifikasi atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang Hakim Konstitusi yang berbunyi “hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan pula kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang hakim sebagai berikut:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup>Arfan Faiz Muhlizi, “Melahirkan Hakim Reformis”, Jurnal Rechtsvinding- Online, hlm. 1.

<sup>73</sup> Mompang L. Panggabean, *Op.cit.* hlm. 50.

- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Syarat Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia secara khusus diatur dalam UU MK, Pasal 15 dan 16 yang isinya sebagai berikut:

#### Pasal 15

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketegaraan

#### Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berpendidikan sarjana hukum;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat Pengangkatan;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

### 3. Syarat Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

#### 3.1. Austria (*Austria The Federal Constitutional Law Of 1920*)

Austria adalah negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tahun 1920. Sesudah itu, barulah ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ditiru dan diikuti oleh negara-negara lain.<sup>74</sup>

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 147 Konstitusi Austria. Jika diperhatikan isi pasal tersebut, maka ketentuan yang mengatur mengenai syarat anggota (hakim) Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Ayat (2), (3), (4), dan (5). Pada Pasal 147 Ayat (2) Konstitusi Austria disebutkan bahwa, para anggota Mahkamah Konstitusi harus dipilih dari antara hakim, pejabat administrasi, dan profesor di bidang hukum.<sup>75</sup> Selanjutnya pada Ayat (3), diatur bahwa Para anggota dan anggota pengganti Mahkamah Konstitusi harus telah menyelesaikan studi hukum atau studi di bidang hukum dan ilmu politik dan memiliki sepuluh tahun pengalaman profesional.<sup>76</sup> Pada Ayat (4), diatur bahwa orang-orang yang memegang jabatan politik (Pemerintah Federal, badan

---

<sup>74</sup>Jimly Assiddiqie, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/> [diakses pada Selasa, 4 April 2017].

<sup>75</sup>Perhatikan Pasal 147 Ayat (2) *Austria The Federal Constitutional Law Of 1920*, pada Ayat ini diatur mengenai mekanisme rekrutmen keanggotaan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai syarat yang berbunyi “.....these members and the substitute members shall be selected from among judges, administrative officials, and professors holding a chair in law.....”.

<sup>76</sup>Perhatikan Pasal 147 Ayat (3) *Austria The Federal Constitutional Law Of 1920*, pada Ayat ini diatur mengenai kualifikasi hakim konstitusi yang berbunyi “The members and substitute members of the Constitutional Court must have completed legal studies or studies in law and political science and have had ten years of professional experience”..

perwakilan umum, dan Parlemen Eropa) dan jabatan di Partai Politik tidak dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.<sup>77</sup> Pada Ayat (5) diatur bahwa siapapun yang selama lima tahun sebelumnya memegang salah satu jabatan sebagaimana disebutkan pada Ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi.<sup>78</sup>

### **3.2. Republik Chili (Konstitusi Republik Chili 1980)**

Republik Chili merupakan salah satu negara di Amerika Selatan yang juga memiliki Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 92 Konstitusi Chili 1980 disebutkan komposisi hakim dan syarat orang-orang yang dapat mengisi komposisi tersebut. Syarat Hakim Konstitusi yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu: a) Memiliki gelar praktisi hukum yang diperoleh setidaknya sejak lima belas tahun, b) memiliki keunggulan dalam kerja profesionalnya baik di bidang akademik (di dalam universitas) maupun suatu kegiatan umum, dan c) tidak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengadilan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Perhatikan Pasal 147 Ayat (4) *Austria The Federal Constitutional Law Of 1920*, pada Ayat ini diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat mengisi jabatan Anggota (hakim) Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut berbunyi “ *The following cannot belong to the Constitutional Court: members of the Federal Government, or a Land Government furthermore members of a general representative body or of the European Parliament; for members of a general representative body or of the European Parliament; who have been elected for a fixed term of legislation or office such incompatibility continues until the expiry of that term of legislation or office. Finally persons who are in the employ of or hold office in a political party cannot belong to the Constitutional Court.*”

<sup>78</sup>Perhatikan Pasal 147 Ayat (5) *Austria The Federal Constitutional Law Of 1920*, berbunyi “*Anyone who during the preceding five years has exercised one of the functions specified in para 4 above cannot be appointed President or Vice-President of the Constitutional Court*”.

<sup>79</sup>Perhatikan *Constitution Of Republic Of Chili 1980, Article 92*, terdapat kutipan mengenai syarat yang berbunyi “*.....They must have held the degree of lawyer for at least fifteen years, must have excelled in professional, academic or public*

### 3.3. Kolumbia (Konstitusi Kolumbia 1991)

Syarat Hakim Konstitusi di Kolumbia diatur pada Pasal 232 yang mengatur bahwa ada empat syarat pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, atau Dewan Negara, yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Merupakan Warga Kolumbia berdasarkan kelahirannya dan merupakan warga negara yang baik;
- 2) Merupakan seorang praktisi hukum;
- 3) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara, kecuali kejahatan politik dan kejahatan serupa;
- 4) Memiliki pengalaman selama lima belas tahun, di Bidang Yudisial atau Departemen Umum, dan memiliki catatan yang baik selama menjalankan pekerjaannya, Berprofesi sebagai praktisi hukum atau posisi akademik di sebuah universitas yang dikenal dan terpercaya dengan disiplin hukum.

---

*activity, must not have any ineligibility that renders them unfit to hold the office of judge,.....”*

<sup>80</sup>Perhatikan Konstitusi Columbia 1991, Pasal 232 yang berbunyi “*In order to be a judge of the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice, or the Council of State, the following requirements must be met: 1. To be Colombian by birth and a citizen in good standing, 2. To be a lawyer, 3. Not to have been charged by a court sentence to imprisonment, except for political or similar crimes, 4. Having worked, during fifteen years, in positions within the Judicial Branch or the Public Ministry, or having exercised, with good record, during the same period, the profession of attorney or an academic position in a university in judicial disciplines in officially known institutions. For the rank of Magistrates of the Supreme Court of Justice and the Council of State, the academic position in the university should be in a judicial discipline related with the area of expertise of the Magistrate office.*

*In order to be a judge of these courts it is not necessary to be a public employee of the judicial ranking system.*

### 3.4. Spanyol (Konstitusi Spanyol 1978)

Pada Konstitusi Spanyol Tahun 1978, ketentuan mengenai Syarat atau kualifikasi Hakim Konstitusi terletak pada Pasal 159 Ayat (2), yang menyatakan bahwa Anggota Mahkamah Konstitusi harus dipilih di antara para jaksa dan hakim, profesor universitas, pejabat publik, dan pengacara, dan masing-masing harus telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya selama lima belas tahun.<sup>81</sup>

### 3.5. Turki (Konstitusi Turki 1982)

Syarat Hakim Konstitusi di Turki diatur pada Pasal 146 Konstitusi Turki, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, anggota staf pengajar wajib memiliki gelar profesor; pengacara wajib telah berlatih sebagai pengacara selama setidaknya dua puluh tahun; eksekutif tingkat tinggi wajib telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan telah bekerja selama setidaknya dua puluh tahun dalam pelayanan publik, dan kategori hakim pertama dan jaksa penuntut umum dengan sedikitnya dua puluh tahun pengalaman kerja termasuk masa pencalonan, dengan batas usia di atas empat puluh lima tahun.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Perhatikan *Section 159* Konstitusi Spanyol 1978 yang berbunyi, “2. *Members of the Constitutional Court shall be appointed among magistrates and prosecutors, university professors, public officials and lawyers, all of whom must have a recognized standing with at least fifteen years' practice in their profession*”.

<sup>82</sup> Perhatikan Konstitusi Turki 1982 *Article 146* pada bagian yang menyatakan “.....*To qualify for appointments as members of the Constitutional Court, members of the teaching staff shall be required to possess the title of professor or associate professor; lawyers shall be required to have practiced as a lawyer for at least twenty years; high level executives shall be required to have completed higher education and to have worked for at least twenty years in public service, and first category judges and public prosecutors with at least twenty years of work experience including their period of candidacy, provided that they all shall be over the age of forty five.*”



### 3.6. Republik Dominika (Konstitusi Dominika 2015)

Syarat Hakim Konstitusi di Republik Dominika diatur pada Pasal 187 Konstitusi Dominika, yang menyatakan bahwa *“In order to be a judge of the Constitutional Court, the same conditions demanded for judges of the Supreme Court are required.....”*. Jika diperhatikan kutipan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa syarat hakim konstitusi sama dengan syarat hakim Mahkamah Agung. syarat hakim Mahkamah Agung di Republik Dominika diatur pada Pasal 153 Konstitusi Dominika, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat untuk menjadi Hakim laki-laki atau perempuan pada Mahkamah Agung, syarat itu diantaranya:<sup>83</sup>

- 1) Laki Laki atau Perempuan Dominika berdasarkan kelahiran atau asalnya, berusia lebih dari tiga puluh lima tahun;
- 2) Telah mengikuti Pelatihan Penuh Hak-Hak Sipil dan Politik;
- 3) Merupakan seorang sarjana atau doktor di bidang hukum;
- 4) Memiliki Pengalaman sebagai Praktisi Hukum atau Profesor di bidang Hukum selama dua belas tahun, atau memiliki pengalaman dengan periode yang sama pada kantor kekuasaan kehakiman atau perwakilan dari kementerian umum, periodenya (waktunya) dapat diakumulasi.

---

<sup>83</sup> Perhatikan Konstitusi *Dominican Republic 2015, Article 153 “In order to be a male or female judge of the Supreme Court of Justice, one is required: 1.To be a male or female Dominican by birth or origin and to have reached more than thirty-five years of age; 2.To find oneself in full exercise of the civil and political rights, 3.To be a bachelor or doctor in law. 4.To have practiced the profession of lawyer or university professor of law for at least twelve years, or to have exercised for the same time period the office of judge within the Judicial Power or of representative of the Public Ministry. These periods may accumulate.”*

## **B. Analisis**

Setelah membahas pengertian negarawan, maka penting juga untuk mengetahui perwujudan syarat negarawan tersebut dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi yang memiliki posisi strategis dalam mengawal demokrasi konstitusional di Indonesia.

### **1. Perwujudan Syarat Negarawan Menurut Ahli**

Janedjri M. Gaffar berpendapat bahwa sebagai perwujudan dari makna negarawan, maka pada saat seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi, semua ikatan yang dapat mengurangi kualitas kenegarawanan harus ditanggalkan agar dapat merdeka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan konstitusional.<sup>84</sup> Pernyataan Janedjri M. Gaffar tersebut sejalan dengan instrumen yuridis yang menyatakan dengan tegas larangan merangkap menjadi jabatan negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri oleh seorang hakim konstitusi.<sup>85</sup> Oleh karena itu perwujudan syarat

---

<sup>84</sup> Janedjri M. Gaffar, *Op.cit.*

<sup>85</sup> Lihat Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

negarawan berarti menanggalkan ikatan pekerjaan atau profesi lainnya sehingga dapat fokus mengawal tugas-tugas mulia di Mahkamah Konstitusi.

Memperoleh hakim konstitusi yang negarawan adalah sifat individu yang tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupannya . Oleh karena itu ada atau tidak adanya sifat dan karakter tersebut tidak dapat dilihat pada level pengetahuan di saat tertentu saja. Sifat dan karakter kepribadian itu hanya dapat dilihat dari rekam jejak (*track record*) dan penilaian dari masyarakat yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam proses perekrutan calon hakim konstitusi.<sup>86</sup> Pernyataan Ali Syafa'at tersebut sejalan dengan perintah Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif", lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2) UU MK juga dinyatakan bahwa pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.<sup>87</sup>

Salah satu kriteria negarawan dalam bahasan sebelumnya yaitu memiliki moralitas. Menurut AB. Ghoffar, banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui moralitas seorang calon hakim konstitusi, salah satu cara yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan panitia

---

<sup>86</sup> Muchamad Ali Safa'at, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi", Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, di Jember, 20 sampai 22 Mei 2016

<sup>87</sup> Lihat Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

seleksi adalah dengan melihat perilaku sehari-hari. Hal-hal yang harus ditelusuri misalnya terkait hubungan sosial sang calon dengan tetangga dan keluarganya. Pansel juga harus melihat latar belakang pekerjaan atau profesinya. Jika politisi, harus ditelusuri perilakunya selama menjadi politisi, apakah mempunyai rekam jejak hitam atau tidak. Jika dia seorang akademisi, juga harus ditelusuri apakah selama ini amanah dengan anak didiknya, apakah mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendidik mahasiswanya, atau sering “kabur-kaburan”. Begitupun dengan latar belakang profesi lainnya.<sup>88</sup>

Dalam hal hubungan dengan Tuhannya, penting juga bagi panitia seleksi untuk menelusuri religius-tidaknya seorang calon. Selain itu, pansel juga harus menelusuri soal gaya hidup calon. Misalnya, terkait dengan pola pembelanjaan uangnya, berapa harga baju yang dia pakai, berapa harga jasnya, berapa harga sepatunya, berapa harga tasnya, dan mobil jenis apa yang ia gunakan. Apakah dia sosok yang suka berfoya-foya, menghabiskan waktunya berjam-jam di restoran-restoran elit, berolah raga di tempat-tempat yang berbiaya mahal seperti golf, atau juga suka nongkrong di tempat hiburan yang berpotensi melanggar susila.<sup>89</sup> Pendapat AB. Ghoffar tersebut juga sejalan dengan pengertian atau makna negarawan sebagaimana dijelaskan dalam analisis permasalahan pertama yang mengungkap bahwa negarawan adalah sosok yang sederhana.

---

<sup>88</sup> AB. Ghoffar, *Op.cit.* hlm. 9.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Kriteria minimal kedua yang diajukan oleh AB. Ghoffar mengenai hakim konstitusi yang negarawan adalah memiliki visi. AB. Ghoffar berpendapat bahwa dalam penerapan atau perwujudan yang paling sederhana, bervisi ini harus dimaknai setidaknya seorang hakim konstitusi harus bertipe ilmunan. Wujud dari tipe ini bisa digambarkan sebagai seseorang yang selalu 'haus ilmu', tidak ada hari yang dilewatkan tanpa membaca buku dan menuliskan ide-idenya. Olehnya itu dalam proses seleksi hakim konstitusi, penting bagi panitia seleksi untuk menelusuri jumlah buku yang telah dibuat, jumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikan, buku terbaru apa saja yang sudah dibaca, dan tentu saja berapa bahasa asing yang dikuasai.<sup>90</sup>

## **2. Perwujudan Syarat Negarawan dan Konsep Hakim**

Hakim memegang peranan penting dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu jabatan hakim merupakan jabatan dengan proses seleksi yang panjang dan ketat. Setiap hakim haruslah merupakan orang-orang pilihan terbaik yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, serta telah ditempa melalui berbagai pengalaman *multidimensional*. Hakim konstitusi merupakan bagian dari hakim yang menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat hakim konstitusi di Indonesia yakni negarawan yang secara khusus hanya disematkan pada jabatan itu dalam UUD NRI 1945, syarat ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU

---

<sup>90</sup>*Ibid.*

MK, namun selama ini syarat ini menimbulkan pertanyaan dalam perwujudannya, karena secara otentik sama sekali tidak ada penjelasan mengenai proses perwujudan syarat negarawan tersebut.

Konsep hakim sebagai penjaga keadilan yang bijaksana sejatinya bersesuaian dengan makna negarawan, yang memuat cakupan adil dan bijaksana tersebut. Namun konsep/makna negarawan yang terlalu luwes juga tentu menimbulkan kesulitan dalam perwujudannya sehingga seharusnya diwujudkan melalui syarat-syarat yang disebutkan secara konkret melalui undang-undang, atau instrument pelaksanaannya.

Melalui pendekatan perbandingan negara, diketahui bahwa syarat negarawan hakim konstitusi di Indonesia merupakan syarat yang khas karena berbagai negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi seperti Austria, Chili, Kolumbia, Spanyol, Turki, dan Republik Dominika sama sekali tidak menyebut persyaratan negarawan (*statesman* atau *statespeople*) untuk hakim konstitusinya.<sup>91</sup> Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun instrumen peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, hakim konstitusi merupakan satu-satunya jabatan yang disematkan kualifikasi atau syarat negarawan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>91</sup>Baca konstitusi masing-masing negara yang disebutkan, hal ini didasarkan pada *comparative approach* sebagaimana telah dibahas pada tinjauan pustaka permasalahan ini.

### **3. Perwujudan Syarat Negarawan dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pada Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *erga omnes* yang mengandung pengertian bahwa putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi kedua belah pihak pemohon dan termohon di Mahkamah Konstitusi, namun segenap penyelenggara negara dan warga negara Indonesia. Ini mengandung konsekuensi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibanding dan mengikat setiap orang.

Perwujudan syarat negarawan jika dikaitkan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting, mengingat seorang negarawan tentu mengambil keputusan dengan bijak dan berbagai pertimbangan, baik jangka pendek hingga jangka panjang, serta dengan menggali berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mencederai hak dan keadilan konstitusional serta cita-cita bernegara hukum yang demokratis sebagaimana amanah UUD NRI 1945.

### **4. Perwujudan Syarat Negarawan pada Pasal 24C UUD NRI 1945**

Merujuk pada proses seleksi yang dialami secara langsung oleh hakim konstitusi, dalam sebuah wawancara khusus bersama Wahiduddin Adams yang dilakukan oleh Tim Majalah Konstitusi, mengungkap pertanyaan seputar syarat negarawan. Wahiduddin Adams yang

merupakan hakim konstitusi yang diseleksi oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR mengungkap pertanyaan panitia seleksi yang menanyakan bahwa “apakah anda merasa sudah merasa negarawan?”, Wahiduddin menjawab bahwa tidak mudah merumuskan makna negarawan, lebih lanjut ketika ditanya apakah pernah ada di Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang mengatur mengenai negarawan, Wahiduddin menjawab pernah ada dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu ketika ditanya mengenai siapakah yang paling negarawan, Wahiduddin Adams menjawab bahwa negarawan tidak memiliki hierarki, jadi tidak ada yang paling atau kurang negarawan.<sup>92</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan dan analisis yuridis mengenai perwujudan negarawan, maka penulis menggambarkan perwujudan negarawan dalam tabel berikut ini:

**Tabel**  
**Perwujudan Syarat Negarawan Hakim Konstitusi**

| <b>Kriteria</b> | <b>Perwujudan</b>   |
|-----------------|---|
| Pengalaman      | Penelusuran rekam jejak calon   |
| Pengetahuan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Ilmiah</li> <li>• Jumlah buku yang telah dibuat</li> </ul> |

---

<sup>92</sup>Tim Majalah Konstitusi, “Profil Hakim: Wahiduddin Adams Sosok Sederhana Nan Religius”, Majalah Konstitusi Edisi No. 86 April 2014. Hlm. 48.



| Kriteria      | Perwujudan   |
|---------------|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Bacaan</li> <li>• Pengetahuan umum</li> </ul>  |
| Kepribadian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelusuran rekam jejak calon</li> <li>• Hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat.</li> <li>• Pandangan masyarakat tentang calon</li> <li>• Pola hidup (pola pembelanjaan uang, gaya hidup, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari)</li> <li>• Kematangan Usia dan Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara (perhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU MK)</li> </ul> |
| Komitmen/visi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak merangkap jabatan, pekerjaan, atau profesi lain.</li> <li>• Harapan/misi mulia yang ingin diwujudkan.</li> <li>• Gagasan/ide terkait permasalahan bangsa dan negara (bertipe ilmunan)</li> <li>• Pengucapan sumpah dan/atau Janji Hakim Konstitusi</li> </ul>   |

Perwujudan kriteria negarawan hakim konstitusi tersebut lebih lanjut harus dijabarkan dalam ukuran yang konkret. Menurut analisa penulis, syarat negarawan hakim konstitusi belum diwujudkan secara maksimal oleh panitia seleksi hakim konstitusi. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai tingkat pengetahuan, kepribadian, pengalaman, dan komitmen seorang hakim konstitusi. Misalnya saja, berapa jumlah buku dan/atau publikasi ilmiah seorang calon hakim konstitusi untuk dapat mengikuti seleksi hakim konstitusi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kata negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 belum mencerminkan perwujudan fungsi bahasa hukum (fungsi komunikasi dan ragam teknik), Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU MK, juga belum mencerminkan asas kejelasan rumusan dan asas dapatnya dilaksanakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai perintah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih menimbulkan kebingungan bagi pelaksana undang-undang dan masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Ditinjau dari komposisi bahasa hukum dan konstitusi, memperhatikan makna negarawan yang mencakup pengalaman yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam, kepribadian yang tidak tercela, serta komitmen mulia untuk bangsa dan negara, maka komposisi bahasa konstitusi pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 dan komposisi bahasa hukum pada Pasal 15 UU MK, yang menempatkan syarat negarawan berdampingan dengan syarat lain yang sejatinya merupakan cakupannya menjadi tidak tepat, karena bersifat berulang/berlebihan (*redundant*).

2. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi dalam UUD NRI 1945 merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan jabatan hakim yang memegang peranan dalam mengawal keadilan. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi memiliki dampak besar karena akan selalu bersinggungan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat bagi segenap penyelenggara negara dan warga negara. Perwujudan syarat negarawan dapat diperoleh dengan menelusuri rekam jejak calon untuk mengetahui tingkat pengalaman; menelusuri jumlah buku dan/atau jumlah publikasi ilmiah, pengetahuan umum, dan bahan bacaan seorang calon hakim konstitusi untuk mengetahui tingkat pengetahuan; menelusuri pola hidup dan hubungannya dengan lingkungannya untuk mengetahui kepribadian; serta menanggalkan jabatan, pekerjaan, atau profesi lainnya, mengkhidmadkan dirinya memberi gagasan dan ide bagi permasalahan bangsa dan negara, yang keseluruhan berpuncak pada pengucapan sumpah atau Janji Hakim Konstitusi, sebagai wujud komitmennya terhadap bangsa dan negara. Perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi selama ini belum maksimal, mengingat belum ada ukuran baku dalam proses seleksi mengenai tingkat pengetahuan, pengalaman, kepribadian, dan komitmen seorang calon hakim konstitusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembangunan hukum nasional melalui penyempurnaan bahasa hukum, serta penegakan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, maka ke depan penting untuk melakukan penyempurnaan bahasa hukum (komposisi bahasa konstitusi) pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 melalui jalan perubahan konstitusi, atau mempertahankan rumusan tersebut sepanjang dimaknai bahwa perwujudan syarat yang lain secara keseluruhan otomatis menjadi perwujudan syarat negarawan, atau dengan melakukan revisi terhadap UU MK untuk menjabarkan secara konkret syarat negarawan tersebut dan penjelasannya.
2. Pemerintah (Presiden), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung ke depannya sekiranya dapat membuat pedoman bersama yang menjadi panduan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, pedoman tersebutlah yang termasuk memuat poin-poin perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi, serta menetapkan ukuran baku mengenai tingkat pengetahuan, pengalaman, kepribadian, dan komitmen sehingga memudahkan panitia seleksi hakim konstitusi yang dibentuk masing-masing oleh Pemerintah, DPR, dan MA dalam menyeleksi hakim konstitusi yang memiliki kualitas kenegarawanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Astim Riyanto, 2009, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.
- Dewa Gede Atmadja (et.al), 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Dri Utari Christina (et.al)(ed.), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI (Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konsitusional Warga Negara*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- H.M Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M Khoirul Anam (Penerjemah)(ed.), 2015, Terjemahan dari *The Spirit of Laws*, Montesquieu, 1977, Nusa Media, Bandung.
- Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Maria Farida, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Salim HS (ed.), 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo (ed.), 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

### **ARTIKEL DALAM MAJALAH DAN JURNAL**

AB. Ghoffar, "Menyederhanakan Negarawan" Majalah Konstitusi Nomor 121, Maret 2017.

Arfan Faiz Muhlizi, "Melahirkan Hakim Reformis", Jurnal Rechtsvinding- Online.

Hamdan Zoelfa, "Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di Negara Indonesia", Jurnal Hukum KONSIDERATUM UNS, Vol. 2 tahun 2012

Henry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 9, Nomor 3 Desember 2012.

Mompang L. Panggabean, "Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal", Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2013.

Nurhadiantomo, "Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat", PRANATA HUKUM, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2006.

Tim Majalah Konstitusi, "Profil Hakim: Wahiduddin Adams Sosok Sederhana Nan Religius", Majalah Konstitusi Edisi No. 86 April 2014.

Zumri Bestado Sjamsuar, "Grand Teori Politik Negarawan", Jurnal Varia Bina Civika No. 75 Tahun 2009.

### **INSTRUMEN HUKUM NASIONAL, ASING, DAN INTERNASIONAL**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Konstitusi Federal Austria Tahun 1920.

Konstitusi Kolumbia Tahun 1991.

Konstitusi Republik Chili Tahun 1980.

Konstitusi Republik Dominika 2015.

Konstitusi Spanyol Tahun 1978.

Konstitusi Turki Tahun 1982.

*Universal Declaration of Human Rights.*

### **SUMBER LAIN**

Abid Musaddad, *“Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Detik News, Syarat Hakim Konstitusi Harus Negarawan, Jimly: Bukan Politikus, <https://news.detik.com/berita/d-3431764/syarat-hakim-konstitusi-harus-negarawan-jimly-bukan-politikus>, [diakses pada 20 September 2017].

Hadi Herlambang Prabowo, *“Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Janedjri M. Gaffar, “Hakim Konstitusi dan Negarawan”, *Harian Seputar Indonesia*, Kamis 14 Agustus 2008. (Opini)

Jevon Rainhard Berhito, *“Tinjauan Yuridis Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015..

Kwik Kian Gie, “Negarawan dan Politikus”, *Kompas*, Senin, 3 April 2017 (Opini).

Liputan 6, Ini Perbedaan Politikus dan Negarawan Menurut Yudi Latif, <http://news.liputan6.com/read/2660337/ini-perbedaan-politikus-dan-negarawan-menurut-yudi-latif> [diakses pada 19 September 2017].



Muchamad Ali Syafa'at, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi", Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, di Jember, 20 sampai 22 Mei 2016

Yusuf Assidiq, "Fungsi dan Posisi Hakim", Republika Khazanah, Edisi Senin, 3 Januari 2011.